

TAHAPAN PENGAJUAN DESAIN PADA PROYEK PEMERINTAH

Aldi Dwi Saputra¹⁾

1) Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia

E-mail: aldisaputra944@gmail.com

Abstrak

Proyek pemerintah memerlukan proses yang sistematis dan transparan dalam setiap tahapannya, termasuk pengajuan desain. Proses ini bertujuan untuk memastikan rancangan yang diajukan sesuai dengan standar teknis, peraturan perundangan, serta kebutuhan publik. Penelitian ini membahas tahapan-tahapan pengajuan desain pada proyek pemerintah di Indonesia, mulai dari perencanaan awal, penyusunan dokumen desain, proses penilaian, hingga tahap persetujuan akhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka terhadap regulasi yang berlaku serta observasi terhadap beberapa proyek pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa keterpaduan antara dokumen teknis dan administratif sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengajuan desain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perencana dan pihak pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek publik.

Kata kunci: Pengajuan desain, proyek pemerintah, prosedur perencanaan, regulasi teknis

Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan proyek pemerintah, aspek perencanaan menjadi komponen utama yang menentukan kualitas hasil pembangunan. Salah satu bagian penting dari perencanaan adalah proses pengajuan desain, di mana rancangan bangunan, infrastruktur, atau fasilitas publik dinilai kesesuaiannya dengan kebutuhan, regulasi, dan anggaran yang tersedia.

Proses ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga administratif, karena melibatkan koordinasi antara berbagai instansi seperti Kementerian PUPR, Bappenas, dan pemerintah daerah. Kesalahan dalam pengajuan desain dapat mengakibatkan penundaan proyek, pembengkakan biaya, bahkan penolakan perizinan. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai tahapan pengajuan desain sangat penting bagi biro perencana, konsultan, maupun kontraktor yang terlibat dalam proyek pemerintah.

Studi Pustaka

Menurut **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 22/PRT/M/2018**, penyelenggaraan jasa konstruksi pemerintah harus mengikuti prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks pengajuan desain, terdapat beberapa acuan penting seperti:

1. **Permen PUPR No. 8/2021** tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara.
2. **Undang-Undang No. 2 Tahun 2017** tentang Jasa Konstruksi.
3. **Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengajuan desain merupakan bagian dari tahap **Perencanaan Teknis** yang terdiri atas pembuatan konsep desain (concept design), desain dasar (preliminary design), dan desain detail (detail engineering design/DED). Setiap tahap harus melalui proses evaluasi dan persetujuan yang ketat oleh pihak berwenang.

(1)

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah **kualitatif deskriptif**, dengan pendekatan **studi pustaka** dan **observasi lapangan terbatas**. Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data

Menggunakan dokumen regulasi, laporan proyek, serta wawancara informal dengan konsultan perencana yang pernah mengajukan desain proyek pemerintah.

2. Analisis Data

Mengidentifikasi tahapan administratif dan teknis yang umum dilakukan dalam pengajuan desain.

3. Validasi

Membandingkan hasil temuan dengan ketentuan resmi yang tercantum dalam peraturan pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Pengajuan Desain Proyek Pemerintah

1. Perencanaan Awal / Studi Kelayakan dan Briefing

Menetapkan dokumen kebutuhan (program ruang, kebutuhan pengguna, batasan anggaran, regulasi lokasi). Jika briefing awal kurang jelas atau tidak melibatkan stakeholder kunci, dokumen desain selanjutnya berisiko revisi besar.

2. Penyusunan Konsep Desain & Desain Awal

Membuat sketsa konsep (arsitektur dan teknis) untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebelum detail. Aspek integrasi antar-disiplin diperlukan pada tahap ini.

3. Pengembangan & Detail Engineering Design (DED)

Menyusun gambar kerja, spesifikasi teknis, RAB, perhitungan struktur, mekanikal/elektrikal, dan lainnya. Dokumen harus memenuhi standar teknis yang berlaku dan regulasi pengadaan.

4. Review/Evaluasi Teknis & Administratif

Pemerintah atau instansi penilai memeriksa kesesuaian desain terhadap regulasi, standar teknis, keamanan, efisiensi biaya, dan aspek lingkungan. Jika menggunakan sistem DB, evaluasi juga meliputi kesesuaian desain terhadap pelaksanaan konstruksi.

5. Revisi & Penyempurnaan

Konsultan memperbaiki dokumen desain berdasarkan masukan dari evaluasi, hingga memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan persetujuan instansi.

6. Pengesahan & Pengesahan Resmi

Dokumen desain yang telah disempurnakan disahkan oleh pejabat berwenang sebagai dasar kontrak konstruksi atau lelang.

Faktor Kritis dalam Kelancaran Pengajuan Desain

Berdasarkan literatur (khususnya Murtiana Sari, 2025) dan kajian sistem DB, beberapa faktor penting adalah:

1. **Akuntabilitas Konsultan Desain** — konsultan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap dokumen yang diserahkan.
2. **Kolaborasi Antar Disiplin (Arsitektur, Struktur, Mekanikal, dsb.)** agar tidak terjadi konflik teknis di lapangan.
3. **Peran Client Advisor / Reviewer Independen** dalam proyek pemerintah agar pemilik tidak hanya bergantung pada satu pihak.
4. **Penggunaan Teknologi & Integrasi (misalnya BIM / Electronic Document Management)** untuk mendukung koordinasi dan revisi dokumen.
5. **Kemampuan Institusional dan Regulasi yang Mendukung** — regulasi yang jelas dan kapasitas instansi untuk menilai desain juga mempengaruhi. (Implementing DB di Indonesia)
6. **Kemudahan Peraturan dalam Proyek Strategis** — proyek PSN memberi ruang percepatan regulasi yang bisa mendukung proses pengajuan desain

Kesimpulan

Pengajuan desain pada proyek pemerintah merupakan proses yang memerlukan ketelitian, pemahaman terhadap regulasi, serta koordinasi yang baik antara pihak perencana dan instansi pemerintah. Tahapan utama meliputi perencanaan awal, penyusunan dokumen desain, evaluasi

teknis, revisi, dan pengesahan akhir. Proses yang sistematis dan sesuai aturan tidak hanya mempercepat realisasi proyek, tetapi juga menjamin kualitas serta akuntabilitas hasil pembangunan.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada praktisi perencana dan instansi pemerintah yang telah berbagi pengalaman serta informasi terkait prosedur pengajuan desain proyek pemerintah.

Daftar pustaka

- [1] Murtiana Sari, E. (2025). "Improving the quality of design documents in government projects: SLR and Delphi approach." *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 1783-1796. ijirss.com
- [2] Parami Dewi, A. G. D., & Trigunarsyah, B. (2011). "Implementing Design Build Project Delivery System in Indonesian Road Infrastructure Projects." In *Innovation and Sustainable Construction in Developing Countries* (CIB W107 Conference, Hanoi) (pp. 108-117). [ResearchGate](https://www.researchgate.net/publication/312511111)
- [3] Kajian Sistem Pengadaan Proyek Design and Build dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. (–). (n.d.). [*Prosiding / makalah kajian literatur*]. [Academia](https://www.academia.edu/)
- [4] Rasyid, Q. M., dkk. (2022). "Pelaksanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional: kemudahan perizinan dan percepatan." *Jurnal Janitra*. [Jurnal Universitas Padjadjaran](https://ejournal.padjadjaran.id/index.php/janitra)
- [5] Nahdi, M., dkk. (2024). "Examining Solicited Projects of Public–Private Partnerships (PPPs): The case in Indonesia." *Buildings*, 14(6), 1870